

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustono. Budi . 2005. *“Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara” dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal.*, LP3ES. Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bastian. Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta.
- Baskoro, Haryadi. 2010, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djayadi. Hanan 2014. *Menakar Presidensialisme Mutipartai di Indonesia*, Bandung: PT Mizan Publika
- Emmerson. Donald K. 2001. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat*, Transisi. PT Gramedia. Jakarta.
- Fachruddin. Irfan *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Halim. Abdul 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Hanif. Nurcholis. 2003. *Teori dan Praktek Pemerintahan*. Grafindo. Jogjakarta. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo. Jakarta.
- Huda. Ni'matul 2013, *Otonomi Daerah (filosofi, sejarah perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isra, Saldi, 2002, *“Potret Lembaga Perwakilan Rakyat”* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 18.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, Perum dan Percetakan, Jakarta: Balai Pustaka, 1955
- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kelsen. Hans *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2009

- Lexsi J. Moleong. 2001. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- LGSP, 2009,” *Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik”*. LGSP: Jakarta.
- Manan, Baqir, 2004, *DPK, DPR dan MPR dalam UUD Baru*, FH UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001
- Mutiarin, Dyah, 2010, *Diktat Politik Keuangan Negara*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nazriyah. Riri, 2007, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Rubin, Irene S. 2006, *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Chatham House: Chatham.
- Yuwono. Sony dkk, 2008, 008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Subagyo. 2006. *“Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”*. Bandung : Alfabeta.
- Sunarso, S, 2005. *“Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif Daerah”*. Mandar Maju: Bandung
- Sholthan, Azikin. 2011. *Format Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Ombak.
- Wasistiono, S. dan Wiyoso, Y, 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia: Bandung.

## **JURNAL, SKRIPSI, THESIS**

- Budiyono, Januari 2013,” *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance”*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, No 1.

- H Syaukakani dkk, 2012, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Herzon Y, 2001, *Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja SKPD tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. Yogyakarta: UGM
- Handoko, 1999. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Jaweng. Robert E 2013, *Keistimewaan Yogyakarta: babak baru yang menyisahkan sejumlah catatan*, Jurnal Ilmu pemerintahan Indonesia
- McGarry. John *Asymmetry in Federation, Federacies, and Unitary State*, Journal of Ethnopolitics, Vol 6.No 1, maret 2007 .pp 105-116
- Nasution. Bismar” *Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Hukum Indonesia*”, Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, februari 2003
- Perdana. Surya 2005, *Kedudukan Lembaga legislatif dalam Mewujudkan Good Governance setelah Berlakunya Otonomi Daerah*, Media Hukum, Volume XIV, Nomor 1
- Pratikno, et.al., *Menata Ulang Desain Desentralisasi Indonesia*, Policy Brief, Program pasca sarjana Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 210, hlm 3
- Sakir. 2015. *Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2014*, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal DPDRI, 2012, *Keistimewaan Yogyakarta ditinjau dari Hukum Adat, Hukum Pertanahan, dan Hukum Ketatanegaraan*, DPDRI. Jakarta: 2012
- Schermerhorn, John R. *Management*, Wiley 2001
- Tarlton. Chalties D, *Symmetry and Asymmetry as Element Of Federalisme: A Theoretical Speculation*, Journal of Politics, Vol, 27, No 4 (Now, 1965)
- Hanapiah, Muhi. 2011. *Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Bandung: IPDN

**MAKALAH**

Mutiarin. Dyah. 2012, "Dinamika Kebijakan anggaran publik: konfigurasi dan dampak terhadap pembangunan di Daerah". Makalah disampaikan pada orasi ilmiah di Universitas Tridharma Balikpapan dalam rangka wisuda Sarjana angkatan ke 33 dan pasca sarjana angkatan ke 3, sabtu 15 september 2012

## **INTERNET**

<http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/09/03/165328/serapan-dana-keistimewaan-yogya-baru-42-persen>. Diakses pada pukul 13.33 WIB pada tanggal 5 oktober 2016

Kedaulatan Rakyat dalam sakir 2015, "Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014

[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com)/Rabu 13 Januari 2016. Dana Keistimewaan DIY DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Danais. Diakses pada pukul 09.00 Wib tanggal 17 Oktober 2016

M.Mas'udSaid,<http://www.profmmasudsaid.com/news-desentralisasi-asimetris.html>. diakses pada pukul 12.00 WIB, tanggal 12 Agustus 2016.

[http://www.academia.edu/8690923/Desentralisasi\\_Asimetris\\_di\\_Aceh](http://www.academia.edu/8690923/Desentralisasi_Asimetris_di_Aceh)Anggriyana Danastri. Desentralisasi Asimetris di Aceh : Pemberian Otonomi Khusus dan Implementasinya

<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/?p=318> diakses pada pukul 15.30 WIB, tanggal 1 Oktober 2016

## **REGULASI**

Undang-Undang Dasar 1945

UU RI No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta

PP No. 58 Tahun 2005

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004  
tentang tata tertib Dewan Perwakilan rakyat Indonesia

**DOKUMEN TERKAIT**

Laporan Monev Danais Tahun 2015

Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah DIY tentang pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan yang didanai  
dengan Dana Keistimewaan